

KINERJA BADAN LEGISLASI DPRD

Muslim dan Zaili Rusli

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Performance Legislation DPRD. The purpose of this study was to analyze the strategies used in order to improve the performance of Legislation Singingi Kuantan District Council 2009-2014. This study was conducted in Kuantan district legislature Singingi, where the informant research is Regency Kuantan Singingi legislators and prominent intellectuals. Data collected by interview and observation techniques, once the data collected were analyzed using descriptive analysis that promotes qualitative techniques. Results showed performance Legislation Singingi Kuantan district legislature is pretty good. While the dominant factor affecting the performance of the Kuantan district legislature Legislation Singingi are individual factors.

Abstrak: Kinerja Badan Legislasi DPRD. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2009-2014. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan tokoh cerdas pandai. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif yang mengutamakan tehnik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup baik. Sedangkan faktor yang dominan mempengaruhi kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor individual.

Kata Kunci: Organisasi, kinerja organisasi, dan Badan Legislasi DPRD.

PENDAHULUAN

Pergeseran kekuasaan legislasi di daerah dari eksekutif kepada legislatif ternyata belum disertai dengan peningkatan kinerja DPRD dalam menerbitkan dan memproduksi peraturan daerah (Perda) yang berasal dari inisiatif DPRD. Kondisi inilah yang selama ini terjadi fenomena dan permasalahan dari DPRD di seluruh wilayah Indonesia. Rancangan peraturan daerah (Ranperda) lebih banyak masih tetap merupakan titipan atau usulan dari eksekutif dari pada legislatif, sehingga dimana letak urgensi dari pergeseran tersebut kalau pergeseran itu tidak dibarengi dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas peraturan daerah dari inisiatif DPRD.

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi merupakan dasar perencanaan daerah dalam merealisasikan pembangunan daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Perwujudan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan menerbitkan Perda sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan daerah, pelayanan publik dan kesejah-

teraan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi. Fungsi legislasi di dalam DPRD Kabupaten Kuantan Singingi akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi.

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah satu komisi dan diusulkan masing-masing fraksi. Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri satu orang ketua dan satu orang wakil ketua dan dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Masa Jabatan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah ditetapkan untuk masa bhakti 2½ tahun.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari terlaksananya hak yang dimiliki. Hak yang berhubungan langsung dengan fungsi legislasi adalah hak inisiatif DPRD dan hak mengadakan perubahan terhadap Raperda. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, peranan eksekutif

dalam pembentukan perda tersebut terdapat pada setiap tahap dalam proses pembentukan Perda, baik pada tahap persiapan, pembahasan, penetapan maupun pengundangan. Dalam upaya melaksanakan tugasnya selama periode 2009 – 2014 yang telah berjalan ada sebanyak 42 Perda yang disahkan. Dari 42 Perda yang dihasilkan hanya dua yang merupakan rancangan hak inisiatif DPRD, sedangkan sisanya merupakan hasil usulan dari Pemerintah Daerah. Adapun Perda yang dihasilkan berdasar hak inisiatif DPRD adalah Perda No. 11 Tahun 2009 tentang Legalisasi Daerah dan Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Adanya inisiatif DPRD tersebut, walaupun dalam kapasitas yang sangat minim menunjukkan adanya tanggung jawab moral yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Cukup banyak Perda yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Namun peraturan daerah yang disahkan umumnya masih merupakan peraturan daerah yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti tentang APBD atau peraturan daerah yang merupakan hasil revisi dari pelaksanaan peraturan daerah sebelumnya, seperti peraturan daerah perubahan dan sebagainya. Sedangkan peraturan daerah yang merupakan bentuk legislasi baru sering muncul dari eksekutif yang menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kerjanya, seperti tentang pemerintahan desa, pajak daerah dan sebagainya.

Fakta ini menjelaskan bahwa kinerja badan legislasi DPRD masih belum berjalan dengan maksimal, sebab masih banyak usulan peraturan daerah yang lahir dari para pelaksana kegiatan pemerintahan daerah. Oleh karena itu masih sangat diharapkan kinerja yang maksimal dari Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya menerbitkan peraturan daerah yang bisa menjawab isu dan permasalahan yang terjadi di daerah. Strategi yang perlu dilakukan oleh Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan kinerjanya salah satunya adalah dengan bekerjasama pada pihak akademisi dalam upaya

mengetahui kebutuhan rancangan peraturan daerah yang diperlukan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam pemerintahan terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan. Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi, tindakan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personel yang terlibat di dalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang akan mensyaratkan penyesuaian desain organisasi di waktu mendatang, maka pengelolaan perubahan secara efektif tidak hanya diperlukan bagi kelangsungan organisasi tetapi juga sebagai tantangan pengembangan. Perubahan keorganisasian yaitu proses dengan apa organisasi beralih dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan pada masa mendatang dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Perubahan tersebut ditujukan untuk menemukan cara-cara baru menggunakan sumber daya dan kemampuan manusia dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan sesuatu organisasi untuk menciptakan nilai dan memperbaiki hasil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2009 – 2014.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang fenomena yang mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2009 – 2014 bidang legislasi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan

metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2009-2014 bidang Legislasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Legislasi DPRD

Kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Setiap organisasi penting untuk selalu melakukan penilaian terhadap kinerjanya. Karena kinerja suatu organisasi adalah tingkat kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi fungsi serta aturan yang ditetapkan bagi pencapaian tujuan. Untuk itu kinerja dalam suatu organisasi dilakukan segenap sumber daya manusia dalam organisasi tersebut, baik unsur pimpinan maupun unsur pekerja. Sehingga dengan berperannya unsur pimpinan dan sumber daya manusia (bawahan) dalam organisasi, diharapkan organisasi akan menuai atau menghasilkan kinerja yang memuaskan.

Dalam melaksanakan penelitian tentang kinerja lembaga lokal dalam mengimplementasikan program alokasi dana desa ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nasucha yang menjelaskan bahwa dalam mengukur kinerja organisasi publik ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu *responsiveness*, *responsibility* dan *accountability*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu tehnik menganalisa data yang untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan dalam upaya mengetahui kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2009-2014.

1. *Responsiveness*

Kemampuan Badan Legislasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebu-

tuhan dan aspirasi masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Artinya masih dibutuhkan *political will* dari anggota dewan yang duduk di Badan Legislasi untuk bisa mengenali dan menampung secara keseluruhan aspirasi dan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya menerbitkan kebijakan. Sehingga dengan adanya *political will* ini setiap aspirasi yang telah masuk dapat ditelaah dan diterjemahkan dengan sebaik mungkin. Selain itu memang sangat dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi antara anggota dewan yang duduk di Badan Legislasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membahas suatu produk kebijakan. Karena dengan adanya keterlibatan yang dilakukan diharapkan produk kebijakan yang dihasilkan memang untuk kepentingan publik dan pemerintah daerah. Kemudian perlu juga dilakukan penelaahan dan analisis aspirasi publik dengan melibatkan pakar atau ahli dibidangnya. Supaya penterjemahan keinginan dan aspirasi memang benar-benar mengarah kepada keinginan dan kemauan masyarakat dan pemerintah daerah akan suatu produk kebijakan.

2. *Responsibility*

Kejelasan pelaksanaan tugas Badan Legislasi untuk melakukan perencanaan terhadap kebijakan daerah, menyusun skala prioritas kebijakan daerah dan melakukan pembagian tugas dalam membahas kebijakan daerah sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya kebijakan yang akan diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh Badan Legislasi melalui kunjungan kerja dan observasi yang dilakukan. Kegiatan kunjungan kerja, observasi dan usulan pemerintah daerah akan dijadikan dasar bagi Badan Legislasi untuk menyusun rencana kebijakan daerah yang akan disahkan dalam setiap tahunnya. Perencanaan kebijakan daerah yang disusun akan memberikan kemudahan bagi Badan Legislasi untuk merumuskan skala prioritas bagi masing-masing fraksi untuk membahasnya dan direkomendasikan untuk disahkan. Kemudian melalui penyusunan skala prioritas yang dirumuskan akan memberikan kemudahan bagi masing-masing fraksi untuk melakukan

pembahasan dan penelaahan kebijakan daerah yang akan diterbitkan. Namun kelaianan yang masih terjadi dalam proses pembahasan kebijakan daerah yang akan diterbitkan adalah kurangnya keterlibatan *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan daerah. Sebab dengan adanya keterlibatan ini akan banyak memberikan ide dan gagasan demi kesempurnaan kebijakan daerah yang akan diterbitkan. Walaupun mekanisme pembahasan renperda memang kurang melibatkan *stakeholder*, tetapi sebaiknya mekanisme ini diperbaiki untuk berkualitasnya kebijakan daerah yang akan diterbitkan dimasa yang akan datang.

3. *Accountability*

Badan Legislatif baru memiliki komitmen dan konsistensi untuk membaca keinginan publik dengan cukup baik. Artinya Badan Legislatif sudah cukup mampu untuk memiliki motivasi menghasilkan kebijakan daerah dalam setiap tahunnya. Sebab melalui motivasi yang dimiliki diharapkan Badan Legislatif mampu menghasilkan kebijakan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan publik. Walaupun dalam pelaksanaannya Badan Legislatif juga belum begitu terinspirasi dalam menghasilkan kebijakan daerah yang dibutuhkan oleh publik. Selain itu juga dalam upaya menunjukkan komitmen dan pertanggungjawaban kerjanya Badan Legislatif harus bisa melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan daerah yang telah diterbitkan. Sehingga dengan adanya pengawasan ini diharapkan Badan Legislatif bisa termotivasi untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah yang sudah berjalan dalam upaya mencapai kesempurnaan sebuah kebijakan daerah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Badan Legislatif DPRD

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Legislatif DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan teori yang sudah dikemukakan oleh Mangkunegara. Dalam pengukuran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Legislatif DPRD Kabupaten

Kuantan Singingi, penulis menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian yang bisa memberikan penilaian permasalahan tersebut.

1. Faktor Individual

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota Badan Legislatif DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebenarnya sudah baik, yaitu keseluruhannya berpendidikan sarjana. Artinya apabila ditinjau dari pola pikir yang dimiliki oleh anggota Badan Legislatif sudah memiliki tahapan yang baik, karena dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan yang dimiliki. Namun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota Badan Legislatif tidak keseluruhannya sarjana ilmu sosial dan ilmu politik, yang pada dasarnya membahas keilmuan tentang kebijakan daerah. Dari data yang diperoleh bahwa 10 orang anggota Badan Legislatif yang ada 8 orang memiliki keilmuan yang multidisiplin dan bukan keilmuan sosial dan politik, sedangkan 2 orang lagi memiliki keilmuan sosial dan politik. Fakta ini tentunya membuat kemampuan dan keahlian personal Badan Legislatif dalam melaksanakan tugasnya, seperti menyusun dan merumuskan kebijakan daerah sangatlah menyulitkan.

Ketidakmampuan Badan Legislatif dalam merumuskan dan menyusun kebijakan daerah memang mutlak faktor latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Walaupun ada anggota Badan Legislatif yang sudah dua periode menjadi anggota dewan, tetapi akibat bukan keahliannya menyusun dan merumuskan kebijakan daerah tentunya tetap menjadi hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Dampak dari rendahnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki anggota Badan Legislatif membuat banyak usulan kebijakan daerah itu berasal dari pemerintah daerah. Bahkan anggota Badan Legislatif terkadang hanya menerima usulan kemudian membahasnya untuk diusulkan menjadi sebuah kebijakan daerah. Padahal seharusnya anggota dewanlah yang menyusun dan merumuskan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan terhadap fakta, realita dan fenomena yang berkembang di lingkungan masyarakat.

2. Faktor Psikologi

Anggota Badan Legislasi ternyata masih memiliki perilaku kerja yang cukup baik, dimana dalam melaksanakan interaksinya anggota Badan Legislasi masih dapat menunjukkan sikap yang baik kepada setiap anggota dewan ataupun pegawai di Sekretariat Dewan Kabupaten Kuantan Singingi. Kemampuan berperilaku yang cukup baik ini menjelaskan bahwa setiap anggota Badan Legislasi ingin bisa bekerjasama dan berkomunikasi kepada semua pihak dalam upaya melaksanakan beban kerja yang diberikan kepadanya. Dengan perilaku kerja yang baik, anggota Badan Legislasi dapat melakukan komunikasi dengan siapapun anggota dewan yang ada dalam upaya mencari data dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan. Selain itu juga perilaku kerja yang baik, juga akan memberikan kemudahan bagi anggota Badan Legislasi untuk bisa meminta pendapat dan masukan dari setiap anggota dewan terhadap proses perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Kemudian apabila melihat budaya kerja yang dikembangkan oleh anggota Badan Legislasi dalam pelaksanaan kerja masih berjalan dengan baik. Artinya setiap anggota Badan Legislasi masih saling bahu membahu dalam melaksanakan tugasnya untuk bisa merumuskan kebijakan daerah yang berkualitas. Dimana dengan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas akan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi setiap anggota Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya. Sebab kenyamanan bekerja akan memberikan inspirasi, inovasi dan kreativitas kepada setiap anggota Badan Legislasi dalam menghasilkan kinerja yang memuaskan. Selanjutnya melihat lingkungan kerja yang dikembangkan oleh anggota Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup kondusif. Dimana tertatanya ruang kerja yang menarik dan nyaman membuat anggota Badan Legislasi betah dalam melaksanakan tugasnya. Penataan ruang kerja yang menarik juga akan memberikan rasa nyaman dalam bekerja.

3. Faktor Organisasi

Pembagian kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi terhadap setiap anggotanya dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik sebenarnya. Artinya setiap anggota sudah dibebankan pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan kebijakan daerah yang telah dimasukkan pada Badan Legislasi. Namun realita di lapangan beban pekerjaan yang diberikan kepada masing-masing anggota Badan Legislasi belum dapat dijalan dengan sempurna. Dimana masih ada anggota Badan Legislasi yang melimpahkan tugas dan beban kerja kepada anggota Badan Legislasi lainnya, disebabkan oleh alasan pribadi anggota tersebut. Fakta ini membuat ada beberapa anggota Badan Legislasi yang harus mengemban tugas yang telah diberikan kepada rekannya untuk diselesaikan.

Dampaknya proses penyelesaian perumusan dan penyusunan kebijakan daerah yang akan dibahas oleh masing-masing fraksi sering terlambat. Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya anggota Badan Legislasi sudah cukup mampu untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan beban tugasnya. Dimana dari setiap data dan informasi yang telah dikumpulkan akan dijadikan bahan kajian dan analisis oleh anggota Badan Legislasi dalam merumuskan kebijakan daerah. Proses perumusan kebijakan daerah yang dilakukan tentunya melalui kerjasama yang dikembangkan oleh internal Badan Legislasi. Musyawarah dalam merumuskan kebijakan daerah menjadi bentuk kerjasama yang dilakukan oleh anggota Badan Legislasi dalam merumuskan kebijakan. Selanjutnya komitmen kerja yang dimiliki anggota Badan Legislasi sebenarnya sudah cukup baik, karena setiap anggota telah berusaha untuk dapat memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan perumusan kebijakan daerah.

Strategi Peningkatan Kinerja Badan Legislasi DPRD

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dilakukan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Kualitas

Pengembangan kualitas bagi anggota Badan Legislasi dapat dilakukan dengan cara, yaitu : *Pertama*, memberikan kesempatan kepada anggota Badan Legislasi untuk meningkatkan pendidikan formal yang dimilikinya. Dimana penambahan pengetahuan dan kemampuan melalui dunia pendidikan akan lebih membentuk pola pikir yang semakin baik dari masing-masing anggota Badan Legislasi. Karena dengan terjadi pembentukan pola pikir yang semakin baik akan membantu anggota Badan Legislasi untuk mengembangkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. *Kedua*, menyusun program-program pelatihan bagi anggota Badan Legislasi yang berhubungan dengan tugasnya.

2. Kerjasama dengan Pihak Akademisi

Kerjasama merupakan proses pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam upaya melaksanakan dan mengerjakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan. DPRD juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di daerahnya yang bisa membantu anggota DPRD tersebut dalam menyelesaikan beban kerja yang diberikan. Salah satu kerjasama yang perlu dilakukan adalah dengan pihak akademisi, dimana melalui kerjasama yang dilakukan ini pihak DPRD atau khususnya Badan Legislasi dapat melakukan penelitian dan pengujian akan kelayakan rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pihak pemerintah daerah.

3. *Brainstorming*

Melaksanakan studi banding bagi anggota Badan Legislasi ke lembaga lain yang sejenis akan menambah pengalaman bagi setiap anggota Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya. Apalagi dalam pelaksanaan studi banding juga diiringi dengan pelatihan yang dihubungkan pada tugas dan tanggung jawab anggota Badan Legislasi. Sehingga pelaksanaan studi banding yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi anggota Badan Legislasi untuk bisa melaksanakan tugas diorganisasinya sendiri.

SIMPULAN

Kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup baik. Artinya Badan Legislasi belum semaksimal mungkin bisa menghasilkan kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. Ketidakmaksimalan kinerja Badan legislasi dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya bisa saja disebabkan oleh intelegensi dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota Badan Legislasi yang masih belum baik. Sehingga masih belum maksimal bisa menghasilkan kebijakan daerah yang dibutuhkan. Faktor yang dominan mempengaruhi kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor individual. Dimana faktor individual yang dimiliki oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan. SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi merupakan sumber daya utama yang harus dipenuhi organisasi dalam upaya merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Karena dengan memiliki SDM yang berkualitas dan unggul sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka pimpinan organisasi mudah membagikan tugas yang ada berdasarkan kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki SDM tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Amstrong & Baron. 2005. *Performance Management*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi, Riana Arthaty. 2011. "Analisis Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi". *Tesis*, PSIA Universitas Riau, Pekanbaru.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. YKPN, Yogyakarta.
- Mangkunegara Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Rafika Aditama, Bandung.
- Simamora, Henry. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN, Yogyakarta
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.